



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi setiap Instansi Pemerintahan wajib untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan pelayanan prima di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

- Mengingat** : 1. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Solok Selatan ;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ;

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ;
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan ;
13. Standar Operasioanl Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
14. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan terdiri dari :

1. SOP Penetapan Perda Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
2. SOP Penegakkan hukum tentang keselamatan dan kesehatan kerja
3. SOP Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan HI
4. SOP Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
5. SOP Kunjungan ke Lembaga Pelatihan Swasta
6. SOP Dokumen Regulasi
7. SOP Dokumen Kebutuhan SDM

8. SOP Dokumen Kebutuhan dan Kelayakan sarana dan prasarana perizinan
9. SOP Menentukan Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja
10. SOP kebutuhan Instruktur dan sarana pelatihan
11. SOP Penyusunan kebutuhan paket-paket pelatihan yang akan dilaksanakan
12. SOP Mempersiapkan peralatan pelatihan dan tempat pelatihan
13. SOP Menyiapkan tenaga Instruktur sesuai dengan program pelatihan yang akan di laksanakan
14. SOP Menyiapkan tenaga Instruktur sesuai dengan program pelatihan yang akan di laksanakan
15. SOP Menyiapkan calon peserta
16. SOP Pelaksanaan koordinasi ke dinas Provinsi
17. SOP Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan CTKI

18. SOP Merencanakan SDM terkait pelayanan penanda tangan perjanjian kerja
19. SOP Menyiapkan SDM untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan
20. SOP Menyusun kebutuhan SDM untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI
21. SOP Menyiapkan sarana dan prsarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI
22. SOP Memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI
23. SOP Mempersiapkan SDM untuk pemberdayaan TKI purna
24. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi KPA
25. SOP Pencairan Uang Persediaan
26. SOP Pengajuan Permintaan GU
27. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi KPA
28. SOP prosedur pendisposisian surat-surat masuk
29. SOP prosedur pengagendaan surat-surat keluar
30. SOP prosedur penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) dan nominatif pegawai negeri sipil
31. SOP prosedur penyusunan bezzeting pegawai negeri sipil
32. SOP prosedur penyusunan rekapitulasi absen pegawai

33. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (pns)
34. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan gaji berkala (kgb) pegawai negeri sipil
35. SOP prosedur pembuatan skp dan perilaku kerja pegawai negeri sipil (pns)
36. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pembagian tugas personil
37. SOP prosedur pembuatan surat permohonan pindah pegawai negeri sipil (pns)
38. SOP prosedur pembuatan bahan usulan perubahan status calon pegawai negeri sipil (cpns) menjadi pegawai negeri sipil (pns)
39. SOP prosedur pembuatan bahan usulan permintaan kartu pegawai (karpeg)
40. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu isteri (karis)
41. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu suami (karsu)
42. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu tabungan asuransi pegawai negeri sipil (taspen)
43. SOP prosedur pembuatan surat cuti pegawai negeri sipil (pns)
44. SOP prosedur pembuatan surat cuti melahirkan bagi pegawai negeri sipil (pns)
45. SOP prosedur pembuatan surat izin menikah bagi pegawai negeri sipil (pns)
46. SOP prosedur pembuatan surat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (pns)
47. SOP prosedur pembuatan surat izin belajar bagi pegawai negeri sipil (pns)
48. SOP prosedur pembuatan surat tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
49. SOP prosedur pembuatan surat perintah tugas (spt)
50. SOP prosedur pembuatan telaahan staf
51. SOP prosedur penyediaan jasa komunikasi
52. SOP prosedur pembuatan daftar inventarisasi barang milik pemerintah
53. SOP prosedur penyediaan sumber daya air

54. SOP prosedur penyediaan alat tulis kantor (atk)
55. SOP prosedur penyediaan barang percetakan dan penggandaan
56. SOP prosedur penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
57. SOP prosedur penyediaan makan dan minum kegiatan kantor
58. SOP prosedur penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
59. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pejabat pengelola keuangan
60. SOP prosedur pembuatan amprah gaji
61. SOP prosedur pembuatan amprah gaji ke 13
62. SOP prosedur pembuatan amprah kekurangan gaji pegawai
63. SOP prosedur penyusunan rencana kerja anggaran (rka)
64. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)
65. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana kerja (renja)
66. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana strategis (renstra)
67. SOP prosedur penyusunan dokumen laporan analisa kinerja instansi pemerintah (lakip)
68. SOP prosedur penyusunan dokumen lkpj
69. SOP prosedur pembuatan dokumen spj keuangan
70. SOP prosedur pembuatan dokumen data keuangan
71. SOP prosedur pembuatan dokumen buku kas umum (bku)
72. SOP prosedur pembuatan dokumen laporan keuangan
73. SOP prosedur pembuatan dokumen catatan keuangan
74. SOP prosedur pembuatan dokumen administrasi keuangan
75. SOP prosedur pembuatan dokumen inventarisasi data keuangan
76. SOP prosedur penyusunan dokumen tapkin
77. SOP prosedur penyusunan dokumen lppd

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,

Dto.

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Dto.

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : 8